**Research Review**
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 5, No. 1, Mei 2026 ISSN: 29622743

# Pengaruh Kebijakan Kepada Desa terhadap Pengembangan UMKM di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

## *(The Effect of Village-Level Policy on the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs): A Study in Hulawa Village, Telaga District, Gorontalo Regency)*

**Nur Mutiya K. Tamu[1], Roy Hasiru [2], Cristian Polamolo [3], Melizubaida Mahmud[4], Rierind Koniyo[5]**
[1,2,3,4,5]Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
nurmutiyatamu@gmail.com[1], royhasiru@ung.ac.id[2], polamolocr@ung.ac.id[3], melizubaida@ung.ac.id[4], rierindkoniyo@ung.ac.id [5]

**Article Info**

***Article history:***

Received: 29 April 2026
Revised: 19 Mei 2026
Accepted: 20 Mei 2026

***Keywords:***

*Village Head Policy*
*MSME Development*
*Hulawa Village*

**Kata Kunci:**

Kebijakan Kepala Desa
Pengembangan UMKM
Desa Hulawa

**Abstract**

*This study aims to analyze the effect of village head policies on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Hulawa Village, Telaga District, Gorontalo Regency. MSMEs play a strategic role in enhancing the rural economy; therefore, support from village government policies is a crucial factor in promoting business growth and sustainability. This research employed a quantitative approach using simple linear regression analysis. The population of this study also served as the sample, consisting of 49 MSME actors in Hulawa Village. Data were collected through questionnaires developed based on indicators of village head policies and MSME development. The data were analyzed using t-tests and the coefficient of determination ($R^2$). The results indicate that village head policies have a significant effect on MSME development, as evidenced by a significance value of 0.016 (<0.05). The coefficient of determination of 11.8% shows that village head policies contribute 11.8% to MSME development, while the remaining 88.2% is influenced by other factors beyond the scope of this study. It can be concluded that village head policies play a role in encouraging MSME development; however, additional supporting factors are needed to achieve more optimal outcomes.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan kepala desa terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa, sehingga dukungan kebijakan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. Populasi penelitian sekaligus dijadikan sampel, yaitu 49 pelaku UMKM di Desa Hulawa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner berdasarkan indikator kebijakan kepala desa dan pengembangan UMKM. Data dianalisis menggunakan uji t dan koefisien determinasi ($R^2$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 (<0,05). Nilai koefisien determinasi sebesar 11,8% menunjukkan kontribusi

kebijakan kepala desa terhadap pengembangan UMKM, sementara 88,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Disimpulkan bahwa kebijakan kepala desa berperan dalam mendorong pengembangan UMKM, namun diperlukan dukungan faktor lain agar pengembangan dapat berjalan lebih optimal.

***Corresponding Author:***

Nur Mutiya K. Tamu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo
nurmutiyatamu@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian global, khususnya di negara berkembang. UMKM mencakup lebih dari 90% dari seluruh unit usaha dan menyediakan lebih dari 50% lapangan kerja, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja (Adian et al., 2020). Di Indonesia, peran UMKM semakin signifikan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60,05% serta mampu menyerap hingga 97,16% tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arvitio, 2022).

Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya daya saing, serta kesulitan dalam memperluas akses pasar. Pemerintah terus berupaya melakukan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan kapasitas usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Tambunan, 2023). Dalam konteks daerah, seperti di Gorontalo, UMKM juga memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan potensi sumber daya daerah, termasuk sektor pariwisata dan kerajinan khas seperti Karawo (Dai et al., 2023). Namun, tantangan yang dihadapi tetap serupa, terutama terkait akses modal, teknologi, dan pasar.

Peran pemerintah desa, khususnya kepala desa, menjadi sangat krusial dalam mendukung pengembangan UMKM. Kebijakan kepala desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup perencanaan dan implementasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat (Kamila et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh kepala desa seharusnya mampu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM melalui alokasi anggaran yang tepat, pembinaan usaha, serta fasilitasi akses permodalan.

Namun demikian, kondisi empiris di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan kepala desa terhadap pengembangan UMKM. Meskipun terdapat 49 pelaku UMKM yang mencerminkan potensi ekonomi lokal yang cukup besar, hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum optimal. Permasalahan yang dihadapi meliputi kesulitan dalam memperoleh bantuan permodalan, kurangnya pembinaan dan pelatihan usaha, serta ketidaktepatan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dengan realisasi di lapangan.

Secara teoritis, kepala desa diharapkan memiliki visi yang jelas dan mampu merumuskan kebijakan yang inovatif serta strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa (Djibu et al., 2024). Selain itu, kepala desa juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui kinerja pemerintahan yang efektif (Daa et al., 2025). Akan tetapi, ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan riil pelaku UMKM menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai UMKM di tingkat desa umumnya masih berfokus pada pemetaan potensi, analisis program, dan pendekatan deskriptif kualitatif, seperti yang dilakukan oleh Lefteuw et al. (2024), Al Farisi (2023), Sabaruddin et al. (2024). Penelitian tersebut belum secara spesifik menguji pengaruh kebijakan kepala desa terhadap pengembangan UMKM secara kuantitatif. Penelitian Sunarti (2023) memang menggunakan pendekatan kuantitatif, namun tidak secara khusus menempatkan kebijakan kepala desa sebagai variabel utama. Sementara itu, Alviah (2020)

lebih menekankan pada formulasi kebijakan desa tanpa mengaitkannya langsung dengan pengembangan UMKM. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa minimnya kajian kuantitatif yang secara spesifik menganalisis pengaruh kebijakan kepala desa terhadap pengembangan UMKM di tingkat desa, khususnya pada konteks lokal seperti Desa Hulawa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan kepala desa terhadap pengembangan UMKM di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kebijakan publik di tingkat desa, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian desa secara berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada periode November hingga Desember 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen berupa kebijakan kepala desa terhadap variabel dependen yaitu pengembangan UMKM. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Desa Hulawa yang berjumlah 49 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pendekatan ini digunakan karena jumlah populasi relatif kecil, sehingga seluruh populasi dianggap mampu merepresentasikan karakteristik penelitian secara menyeluruh (Sugiyono, 2022).

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kuesioner. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5, yang merepresentasikan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan (Huh & Gim, 2025).

Variabel penelitian terdiri dari kebijakan kepala desa sebagai variabel independen yang diukur melalui indikator data dan bukti, diskusi dan komunikasi, lingkungan dan budaya, serta saran Alviah (2020), sedangkan pengembangan UMKM sebagai variabel dependen diukur melalui indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan UKM, perlindungan usaha, dan akses pembiayaan (Tarigan et al., 2022).

Pengujian instrumen penelitian dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan instrumen dengan menggunakan korelasi product moment (Sugiyono, 2014), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$rxy = (n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)) / \sqrt{[(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}$$

Keterangan: rxy adalah koefisien korelasi, n adalah jumlah responden, $\sum X$ dan $\sum Y$ adalah jumlah skor masing-masing variabel, serta $\sum XY$ adalah jumlah hasil perkalian skor X dan Y.

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai $\alpha \geq 0{,}60$. Rumus yang digunakan adalah:

$$\alpha = (k / (k - 1)) (1 - (\sum \sigma^2 / \sigma t^2))$$

Keterangan: $\alpha$ adalah reliabilitas instrumen, k adalah jumlah item pertanyaan, $\sum \sigma^2$ adalah jumlah varians item, dan $\sigma t^2$ adalah varians total

Selanjutnya, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui distribusi data penelitian. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), dan sebaliknya dinyatakan tidak normal apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05) (Mishra et al., 2019).

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data berdasarkan persentase dengan tahapan penentuan skor tertinggi, skor terendah, rentang, interval kelas, dan kriteria penilaian (Naif & Mohammed, 2021). Analisis inferensial dilakukan menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX \quad (3)$$

Keterangan:

Y: variabel dependen (pengembangan UMKM)

X: variabel independen (kebijakan kepala desa), $\alpha$ adalah konstanta, dan b adalah koefisien regresi

Selain itu, dilakukan uji koefisien korelasi (r) untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel, serta uji t (parsial) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian ditentukan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai Sig. < 0,05 maka hipotesis alternatif ($H_a$) diterima, dan jika nilai Sig. > 0,05 maka hipotesis nol ($H_0$) diterima.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan Kepala Desa terhadap pengembangan UMKM di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan data kuantitatif dari 49 responden pelaku UMKM. Secara umum, karakteristik wilayah menunjukkan dominasi sektor agraris dengan potensi ekonomi berbasis pertanian, yang menjadi konteks penting dalam memahami dinamika pengembangan UMKM di tingkat desa.

Berdasarkan Tabel 1, komposisi penduduk Desa Hulawa relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang mengindikasikan ketersediaan sumber daya manusia yang merata dalam aktivitas ekonomi desa.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Hulawa

| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.232 | 2.251 | 4.483 |

Sumber: BPS, 2024

Karakteristik responden menunjukkan dominasi perempuan (67%), yang mengindikasikan bahwa UMKM di Desa Hulawa banyak digerakkan oleh perempuan sebagai pelaku utama ekonomi rumah tangga. Selain itu, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA (57%) dan berada pada kelompok usia ≥40 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM dikelola oleh individu dengan pengalaman yang relatif matang, namun dengan keterbatasan pendidikan tinggi yang berpotensi memengaruhi kapasitas manajerial dan adaptasi terhadap inovasi usaha.

Instrumen penelitian telah memenuhi standar kualitas pengukuran. Seluruh item kuesioner dinyatakan valid karena nilai rhitung > rtabel (0,4259), serta reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,957 (>0,6). Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan akurasi yang tinggi. Selain itu, uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,200 > 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan layak digunakan dalam analisis parametrik.

Secara deskriptif, persepsi responden terhadap kebijakan Kepala Desa dan pengembangan UMKM berada pada kategori sedang dengan variasi yang cukup tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Deviasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebijakan Kepala Desa | 49 | 40 | 96 | 69,57 | 15,068 |
| Pengembangan UMKM | 49 | 40 | 99 | 70,43 | 16,322 |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, nilai rata-rata kedua variabel berada pada kategori sedang, namun standar deviasi yang relatif tinggi menunjukkan adanya disparitas persepsi antar responden. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM, sehingga efektivitas kebijakan masih bersifat parsial.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara kebijakan Kepala Desa dan pengembangan UMKM. Ringkasan hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi dan Uji t

| Variabel | Koefisien B | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| Konstanta | 44,536 | 4,218 | 0,000 |
| Kebijakan Kepala Desa | 0,372 | 2,508 | 0,016 |

Sumber: Data diolah, 2025

Persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = 44{,}536 + 0{,}372X + e$

Koefisien regresi sebesar 0,372 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kebijakan Kepala Desa akan meningkatkan pengembangan UMKM secara positif. Nilai signifikansi 0,016 < 0,05 menegaskan bahwa pengaruh tersebut signifikan, sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya dalam konteks desa berbasis agraris.

Namun demikian, kekuatan model tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Determinasi ($R^2$)

| R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error |
|---|---|---|---|
| 0,344 | 0,118 | 0,099 | 15,491 |

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai $R^2$ sebesar 0,118 menunjukkan bahwa kebijakan Kepala Desa hanya mampu menjelaskan 11,8% variasi pengembangan UMKM, sementara 88,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini

mengindikasikan bahwa pengembangan UMKM bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor seperti akses modal, kapasitas SDM, jaringan pemasaran, serta dukungan teknologi.

Secara substantif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Kepala Desa berpengaruh signifikan, namun belum menjadi faktor dominan dalam pengembangan UMKM. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan implementasi kebijakan, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi lokal, serta rendahnya integrasi antara kebijakan desa dan kebutuhan riil pelaku UMKM. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal agar dampaknya terhadap pengembangan UMKM dapat lebih optimal.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Kepala Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pengembangan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh Kepala Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di tingkat desa.

Ditinjau dari indikator kebijakan kepala desa sebagaimana dikemukakan oleh Alviah (2020), aspek data dan bukti menunjukkan bahwa kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaku UMKM, seperti data jumlah usaha, jenis usaha, serta kendala yang dihadapi, mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan data yang akurat ini berdampak langsung pada peningkatan efektivitas program pengembangan UMKM. Selanjutnya, indikator diskusi dan komunikasi memperlihatkan bahwa keterlibatan pelaku UMKM dalam proses musyawarah desa dan forum komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa dan pelaku UMKM mendorong munculnya kepercayaan, partisipasi aktif, serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pengembangan usaha. Hal ini memperkuat posisi UMKM sebagai mitra strategis pemerintah desa.

Pada indikator lingkungan dan budaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal, budaya gotong royong, dan karakter masyarakat desa mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Lingkungan sosial yang mendukung menjadikan UMKM lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Sementara itu, indikator saran menegaskan bahwa kebijakan yang bersifat terbuka terhadap masukan dan evaluasi dari pelaku UMKM berkontribusi positif terhadap perbaikan program secara berkelanjutan. Saran dari pelaku usaha menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika usaha di desa.

Pengaruh kebijakan kepala desa tersebut tercermin pada aspek pengembangan UMKM sebagaimana dikemukakan oleh Tarigan et al. (2022). Pada indikator peningkatan dan pengembangan kualitas SDM, kebijakan desa mendorong adanya pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga kompetensi manajerial dan keterampilan produksi mengalami peningkatan.

Indikator peningkatan kelembagaan UKM menunjukkan bahwa kebijakan desa turut memperkuat legalitas dan kelembagaan UMKM melalui pembentukan kelompok usaha, koperasi, maupun fasilitasi perizinan. Penguatan kelembagaan ini menjadikan UMKM lebih terorganisir dan memiliki daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, pada indikator perlindungan usaha, kebijakan kepala desa berperan dalam memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM melalui regulasi desa, dukungan hukum, serta perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak sehat. Perlindungan ini mendorong keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Terakhir, indikator akses pembiayaan menunjukkan bahwa kebijakan desa yang pro-UMKM mampu membuka peluang pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, program bantuan modal, maupun fasilitasi akses kredit. Kemudahan akses pembiayaan ini menjadi faktor penting dalam pengembangan skala usaha UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pengembangan UMKM di desa. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan kondisi nyata masyarakat serta dinamika ekonomi lokal. Kepala desa sebagai pemegang otoritas di tingkat desa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, khususnya melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.

Kebijakan kepala desa yang disusun dengan memperhatikan kondisi riil UMKM mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha masyarakat. Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan UMKM menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan yang relevan. Kebijakan semacam ini mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha, sehingga kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM mengalami perkembangan. Peningkatan kapasitas tersebut tercermin dari semakin baiknya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan produksi, pemasaran, serta pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Selain berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, kebijakan kepala desa juga berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan UMKM. Dukungan pemerintah desa melalui kebijakan yang terarah mampu mendorong pelaku UMKM untuk berorganisasi, baik dalam bentuk kelompok usaha maupun

kelembagaan ekonomi lainnya. Kelembagaan yang kuat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk saling berbagi informasi, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, kebijakan kepala desa berfungsi sebagai penggerak terciptanya kerja sama dan sinergi antar pelaku UMKM di desa. Yunina dan Pujianto (2024) mengemukakan bahwa melalui inovasi dan bentuk pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mendorong invoasi UMK dan pengembangannya kearah yang lebih baik.

Kebijakan yang dijalankan secara komunikatif dan partisipatif turut menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan pelaku UMKM. Melalui komunikasi yang terbuka, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta harapan mereka terkait pengembangan usaha. Hal ini membuat kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pelaku UMKM merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Lingkungan dan budaya yang dibangun melalui kebijakan kepala desa juga berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan yang mendorong nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat. Lingkungan usaha yang aman dan mendukung memberikan rasa nyaman bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap perlindungan usaha, karena pelaku UMKM merasa memiliki kepastian dan dukungan dari pemerintah desa.

Dalam konteks pengembangan UMKM, kebijakan kepala desa juga berperan dalam membuka peluang akses terhadap pembiayaan. Kebijakan yang berpihak pada UMKM mampu memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi dan kemudahan terkait sumber permodalan. Akses pembiayaan yang lebih terbuka memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan skala usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kepala desa memiliki kontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Sebagaimana dikemukakan oleh Silfiah dan Rohmah (2024), bahwa Peran Kepala Desa dalam Pengembangan UMKM Perkembangan UMKM sangatlah penting, dimana kepala desa sebagai fasilitator mempercepat akses bantuan dan pemasaran produk lokal.

Hal ini sejalan dengan teori Kepala desa berperan aktif dalam pengambilan kebijakan strategis, pendampingan usaha, dan peningkatan daya saing UMKM (Nandang & Pranata, 2022). Lebih lanjut, keterbukaan kepala desa terhadap masukan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi lokal. Dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan yang dihadapi UMKM.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan kepala desa memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan UMKM. Kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan secara tepat mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, perlindungan usaha, serta kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, peran kepala desa menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kepala Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Desa Hulawa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat, terarah, dan mendukung kebutuhan masyarakat mampu mendorong peningkatan aktivitas usaha, produktivitas, serta kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Peran pemerintah desa tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga berperan strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal melalui penyediaan dukungan kebijakan, fasilitasi program pemberdayaan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat desa.

Meskipun demikian, besarnya pengaruh kebijakan Kepala Desa terhadap pengembangan UMKM masih berada pada kategori terbatas, yang mengindikasikan bahwa perkembangan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti akses permodalan, kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta kondisi pasar. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan dukungan dari pihak lain agar pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

### 4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil pelaku UMKM. Upaya tersebut dapat dilakukan

melalui peningkatan akses permodalan, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, pendampingan pengembangan produk, serta perluasan akses pemasaran baik secara langsung maupun berbasis digital. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat membangun kerja sama dengan instansi terkait, lembaga keuangan, maupun pihak swasta guna menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap pengembangan UMKM di Desa Hulawa.

Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha melalui penguatan kemampuan manajerial, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi aktif dalam berbagai program pembinaan yang disediakan pemerintah. Sementara itu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup variabel yang digunakan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi pengembangan UMKM, seperti literasi digital, akses teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan jaringan pemasaran, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan pengembangan UMKM di tingkat desa.

**REFERENSI**


Adian, I., Doumbia, D., Gregory, N., Ragoussis, A., Reddy, A., & Timmis, J. (2020). Small and Medium Enterprises in the Pandemic : Impact, Responses and the Role of Development Finance. *Small and Medium Enterprises in the Pandemic : Impact, Responses and the Role of Development Finance*, *September*. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9414

Al Farisi, M. M. (2023). Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pengembangan UMKM di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, *1*(1), 7. https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i1.1910

Alviah, N. U. R. (2020). Formulasi kebijakan kepala desa dalam pembangunan di desa beringin taluk kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. *Administrasi Negara*, *1*, 251–264.

Arvitio. (2022). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *18*(2), 120–134.

Daa, S. P., Hasiru, R., Polamolo, C., & Bahsoan, A. (2025). Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Pada Masyarakat Di Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo. . . *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, *7(2)*.

Dai, S. L., Ayuningsih, A., Taghulihi, B., Agmareina Hirto, V., Wildayanti Limpas, Z., Sunarti, S., & Khairun, U. (2023). *International Journal of Tourism Business Research (INTOUR) Urban Tourism: A Potential Tourism Attraction in Gorontalo City*. *02*(01), 14–20. https://jurnal.fe.unram.ac.id/

Djibu, N., Hafid, R., Mahmud, M., Panigoro, M., Novrita Dama, M., Koniyo, R., & Sudirman. (2024). Analisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produktivitas kerja aparatur Pemerintah Desa Olimoo'o Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Economic And Business Education*, *2*(2), 69–76. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JEBE/index

Huh, I., & Gim, J. (2025). Exploration of Likert scale in terms of continuous variable with parametric statistical methods. *BMC Medical Research Methodology*, *25*(1), 218. https://doi.org/10.1186/s12874-025-02668-1

Kamila, N. F., Ryo Syahputra Wardana, Ramzi Fauzan, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 178–190. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5084

Lefteuw, M. R. M., Nugroho, H. S., Suyanto, M., & Riatmaja, D. S. (2024). Implementasi Kebijakan Program Desa Preneur ddalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Publika*, *12*(1), 1–15. https://doi.org/10.33603/publika.v12i1.9834

Mishra, P., Pandey, C., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, *22*(1), 67. https://doi.org/10.4103/aca.ACA_157_18

Naif, O. S., & Mohammed, I. J. (2021). Wireless Optimization Algorithm for Multi-floor AP deployment using binary particle swarm optimization (BPSO). *Journal of Physics: Conference Series*, *1963*(1), 012028. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1963/1/012028

Nandang, W., & Pranata, R. M. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengembangkan Umkm Desa Karya Mulya. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, *8*(1), 61-69.

Sabaruddin, A., Maulid, Taslim, Septiana, A. R., Jamaludin, I. I., Triani, & Junus, I. (2024). Identifikasi Potensi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Oko-Oko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Identification of Micro , Small and Medium Enterprise Development Potential in Oko-Oko Village , Pomalaa District , Kolaka Re. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(1), 1–11. https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4687

Silfiah, R. I., & Rohmah, M. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan UMKM Desa

Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. ,. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *12(2)*, 187-197.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung). Alfabeta.

Sunarti, S. (2023). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Lasape (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).*

Tambunan. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia.*

Tarigan, Z. N. A., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI: DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, *15*(1), 12–23. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666

Yunina, D. S., & Pujianto, W. E. (2024). Transformational Leadership di Kantor Pelayanan Desa. Maslahah. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 2(2)*, 58-70.